

Analisa yuridis terhadap situs internet bermuatan negatif dan penanganannya ditinjau menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014 = Juridical analysis of negative internet site based on undang nomor 11 tahun 2008 and peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 19 tahun 2014

Muhammad Farhansyah Hamid, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20444906&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari situs internet yang didefinisikan sebagai situs bermuatan negatif dan bagaimana peraturan di Indonesia mengaturnya, serta mengenai mekanisme dari penanganan situs internet bermuatan negatif tersebut berdasarkan peraturan yang ada, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pembatasan terhadap akses kepada situs tersebut apabila dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak manusia untuk melakukan akses terhadap suatu informasi freedom of information dan public interest. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, penanganan terhadap situs internet bermuatan negatif haruslah memperhatikan perkembangan teknologi yang ada dan haruslah memperhatikan hak atas akses terhadap informasi agar penanganan tersebut dapat dilakukan dengan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

.....

This paper discusses about the concept of an internet site that is defined to be negative and how the Indonesian law regulates it, and about the mechanism of negative site handling based on the regulation of the Minister of Communication and Information Number 19 of 2014. Furthermore, it will be discussed about the human rights to have access to the information and how negative content handling is related to it. This legal research uses a normative juridical approach with secondary data from national regulations, books, and interviews with sources. The result of this research is that content handling is so related to the limitation of human rights so it needs to be regulated carefully so the goals of the regulation are reached.